

Nomor : 05/TN-P3I/IX/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2016**

Jakarta, 22 September 2016

Kepada Yth,
Para Pimpinan K/L/D/I, dan
Kepala Badan / Kantor / Unit Layanan Pengadaan
Di -
T e m p a t

Dengan Hormat,

Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah intervensi berbagai pihak. Keberadaan ULP masih belum maksimal menekan angka tindak korupsi. Posisi ULP masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP yang belum mandiri. Terbitnya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016** Tentang Perangkat Daerah memicu diskusi perbaikan status dan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa menjadi sangat menarik untuk didiskusikan.

Sejurus itu **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI)** sedang mempersiapkan **Peraturan Presiden pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya**. Pokok-pokok perubahan apa saja yang menjadi isu penting dalam peraturan pengganti ini patut mendapatkan perhatian dan masukan dari berbagai pihak yang pasti sangat berkepentingan. Untuk membicarakan hal-hal tersebut secara komprehensif kami mengundang Bapak/Ibu /Saudara, untuk mengikuti kegiatan **Temu Nasional 2016 bertajuk:**

“Reformasi Kelembagaan, Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”

Merumuskan Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ideal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan
Konsultasi Publik Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at - Sabtu / 28 - 29 Oktober 2016**
Waktu : **08.30- 17.00 Wib**
Tempat : **Hotel Mercure Kota - Jakarta**
Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat

Demi tercapainya pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari intervensi maka kami mengajak seluruh pihak terutama pemegang kebijakan, pelaksana pengadaan/barang/jasa dan pihak-pihak lain untuk bergabung dan berbagi pendapat dan pengetahuan pada kegiatan dimaksud.

Untuk informasi pendaftaran Hubungi **Rahfan Mokoginta HP. 0852 9899 9383**.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia



P3I

Khalid Mustafa
Ketua Umum

Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2016 “Reformasi Kelembagaan, Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”

Merumuskan Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Konsultasi Publik Pengganti Perpres Nomor 54 tahun 2010

Pengantar

Tepat sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diskursus tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) sontak mengemuka.

Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi terkait modus korupsi dari 18 modus hampir 80% adalah modus intervensi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Filterisasi melalui ULP dan LPSE dianggap masih belum maksimal dalam menekan angka tindak korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa posisi ULP di daerah masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP masih belum mandiri, meski sudah ada beberapa yang permanen. Kemandirian kelembagaan ULP diyakini menjadikan ULP mampu mengelola sumber daya manusia, anggaran, program dan kegiatan tanpa intervensi dan ketergantungan dengan banyak pihak.

Tidak kurang dari 450 pemerintah daerah dibuat gelisah dalam menetapkan bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa. Terlebih lagi bagi daerah-daerah yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah, minat untuk segera melakukan perubahan kabinet daerah sangat besar. Bulan oktober ini saja pembahasan bahkan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) digenjot habis-habisan. Mestinya perubahan organisasi perangkat daerah ini membawa angin segar bagi penguatan fungsi dan peran pengadaan barang/jasa di daerah.

Sementara itu terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tidak dibarengi dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah yang kini sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tidak punya pegangan yang tegas tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat.

Kuatnya loyalitas sebagian besar pemerintah daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memposisikan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 menjadi faktor kunci perbaikan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.

Atas dasar inilah kemudian diskusi mencari formulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat menjadi sangat penting dalam rangka menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai fungsi strategis dalam rangka memenuhi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas. Yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Inilah saat yang paling tepat untuk merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah mengingat amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah daerah wajib segera menyusun Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Nopember 2016.

Momen besar dari LKPP sebagai Lembaga pembina pengadaan barang/jasa di Indonesia, adalah penyusunan Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Momen penyusunan Perpres ini adalah momen emas untuk memastikan kedudukan kelembagaan pengadaan barang/jasa secara lebih jelas dan tegas, termasuk untuk menampung masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap pengganti perpres tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi lembaga **Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)** berusaha membuka ruang dan kesempatan seluruh pihak untuk bertukar pikiran dalam merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal melalui even **Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia 2016**

Tujuan

1. Temu nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu menyusun kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah
2. Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kerangka penyusunan dan implementasi kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.
3. Temu nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang sangat terlibat dan berkepentingan dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya kelembagaan pengadaan barang/jasa (LKPP, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu mempertajam penyusunan kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa.
4. Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat menghasilkan satu solusi riil terkait regulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah. Diharapkan selepas temu nasional ini masing-masing daerah Kabupaten/Kota segera dapat menyusun, menerbitkan ataupun menyempurnakan peraturan kepala daerah tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa.
5. Diharapkan temu nasional ini dapat menjadi salah satu even terbesar dan pertama dalam rangka konsultasi publik draft Perpres pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, khususnya pada materi kelembagaan dan pokok-pokok perubahan lainnya menyongsong rencana pemberlakuan Perpres baru pada awal tahun 2017.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Bagian Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Bagian Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota
6. PPK/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
7. Akademisi.
8. Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lainnya.

Jadwal Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2016 "Reformasi Kelembagaan, Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi"

Merumuskan Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Ideal berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 dan Konsultasi Publik Penganti Perpres No.54 tahun 2010

Jum'at, 28 Oktober 2016

08.30 – 08.00 : **Pembukaan**

08.40 – 09.00 : **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**

09.00 – 09.30 : Laporan dan Sambutan

Khalid Mustafa (Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia)

09.30 – 10.00 : **Istirahat**

10.00 – 11.30 : **Diskusi Panel**

- Harapan dan Tantangan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
Gubernur Gorontalo

- Garis Besar Kebijakan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

- Urgensi Kelembagaan Permanen dan Berdiri Sendiri, bagi Pemberantasan Korupsi
Pengadaan Barang/Jasa

Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

11.30 – 13.30 : **Istirahat dan Sholat Jum'at**

13.30 – 15.00 : **Diskusi Panel**

- Pentingnya Badan Pengadaan bagi Pemerintah Kota

Walikota Bandung dan Walikota Surabaya

- Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pengelolaan Pengadaan

Bupati Badung

- Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan-RI

Kementerian Keuangan RI

- Kedudukan Kelembagaan Pengadaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kementerian Dalam Negeri RI

15.00 – 15.30 : **Istirahat**

15.30 – 17.00 : **Lanjut Diskusi Panel**

Sabtu, 29 Oktober 2016

09.00 – 10.00 : **Diskusi Panel**

- Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Deputi PPSDM LKPP

10.00 – 10.30 : **Istirahat**

10.00 – 12.00 : **Diskusi Panel**

- Peran Strategis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)

- Pandangan Pengelolaan SDM di Unit Pengelolaan Pengadaan yang Mandiri

Bandan Layanan Pengadaan Prov. DKI Jakarta *)

12.00 – 13.00 : **Istirahat**

13.00 – 15.00 : **Diskusi Panel**

- Konsultasi Publik Perpres pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan
perubahannya

Direktur Kebijakan Umum LKPP

15.00 – 15.30 : **Istirahat**

15.30 – 16.45 : **Lanjut Diskusi panel**

16.45 – 17.00 : **Penutupan dan Pembagian Sertifikat Temu Nasional 2016**

FORMULIR PENDAFTARAN

Konfirmasi Kehadiran Peserta Di rahfan@pengadaan.org atau SMS HP. 0852 9899 9383

Sehubungan dengan Agenda Temu Nasional 2016 "Reformasi Kelembagaan, Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi" ini kami kirimkan Biodata Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telp. Kantor/Fax :

No. Hand Phone : e-mail :

PESERTA 1

Nama Lengkap :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telp. Kantor/Fax :

No. Hand Phone : e-mail :

PESERTA 2

..... 2016

(.....)
Nama Lengkap

Catatan:

*) Lembar konfirmasi dapat diperbanyak / di copy sesuai jumlah peserta peserta.

BIAYA KONTRIBUSI PESERTA

@ Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Tidak termasuk akomodasi

@ Rp.4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Termasuk akomodasi hotel 1 kamar berdua/twin share untuk 4 hari 3 malam

FASILITAS PESERTA

- Standar Dokumen Tender Pemerintah (softcopy).
- Modul dan Materi Slide (lengkap dengan CD) , Sertifikat Temu Nasional.
- Tas dan Alat Tulis.
- Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 dan kegiatan.
- Kemeja Eksklusif dan Flashdisk 4 GB .

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI

Transfer Bank BNI Nomor Rekening 0344 743 660
Atas Nama : Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia

Tunai Saat Registrasi di Hotel

Untuk informasi pendaftaran Hubungi Rahfan Mokoginta HP. 0852 9899 9383